

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, maka pemerintah daerah untuk saat ini memiliki sebuah kewenangan dalam mengelola wilayah mereka masing-masing. Indonesia memiliki 34 Provinsi, yang terdiri dari kabupaten, kecamatan, dan desa, di setiap zona-zona tersebut memiliki struktur pemerintahan tersendiri, sehingga terdapat kebebasan dalam mengatur zona tersebut. Di setiap daerah pasti memiliki masalah dan potensinya masing-masing, sehingga harus ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan dan memanfaatkannya.

Untuk saat ini yang masih menjadi persoalan negara-negara berkembang adalah kemiskinan, termasuk Indonesia. Menurut data dari BPS kemiskinan di Indonesia pada tahun 2014-2017 menunjukkan grafik selalu menurun. Hal ini menunjukkan jika kinerja pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia cukup efektif karena pada tahun 2017 tingkat kemiskinan Indonesia menurun hingga 10,12%.

Tingkat kemiskinan Indonesia yang telah menunjukkan penurunan pada tahun 2017 mungkin akan berbeda jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada setiap daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak daerah yang tertinggal atau tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya penanganan

khusus demi menurunkan tingkat kemiskinan di setiap daerah tersebut. Kemiskinan tentu selalu identik dengan permasalahan sosial masyarakat, sehingga apabila tingkat kemiskinan pada suatu daerah cukup tinggi maka pasti tingkat permasalahan sosial masyarakat daerah tersebut juga akan tinggi pula. DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi di Pulau Jawa, data ini sesuai dengan hasil survey BPS pada tahun 2017, tingkat kemiskinan di DIY(Daerah Istimewa Yogyakarta) mencapai 13,02%.

Tabel 1. 1Tingkat Kemiskinan Se-Pulau Jawa Tahun 2017

Provinsi	Tingkat Kemiskinan (%)
Jawa Barat	7,83 %
DKI(Jakarta)	3,77 %
Jawa Tengah	12,33 %
DIY(Yogyakarta)	13,02 %
Jawa Timur	11,20 %

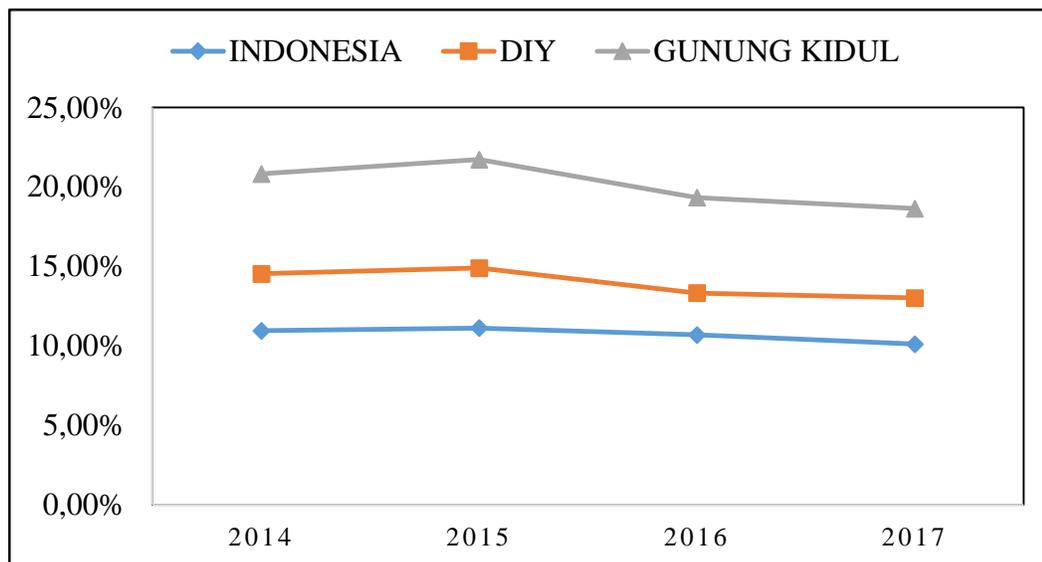
Sumber: BPS.2017

Provinsi Yogyakarta memiliki 5 kabupaten, yaitu Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, dari kelima kabupaten tersebut Gunungkidul mempunyai tingkat Kemiskinan sebesar 18,65% dan menjadi kabupaten yang memiliki pengurangan tingkat kemiskinan tertinggi. Dari pemaparan data kemiskinan antara Indonesia, DIY, dan Gunungkidul, ketiganya

menunjukkan tren yang positif karena tingkat kemiskinan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Sumber: BPS, 2018

Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Indonesia dari Tahun 2014-2017

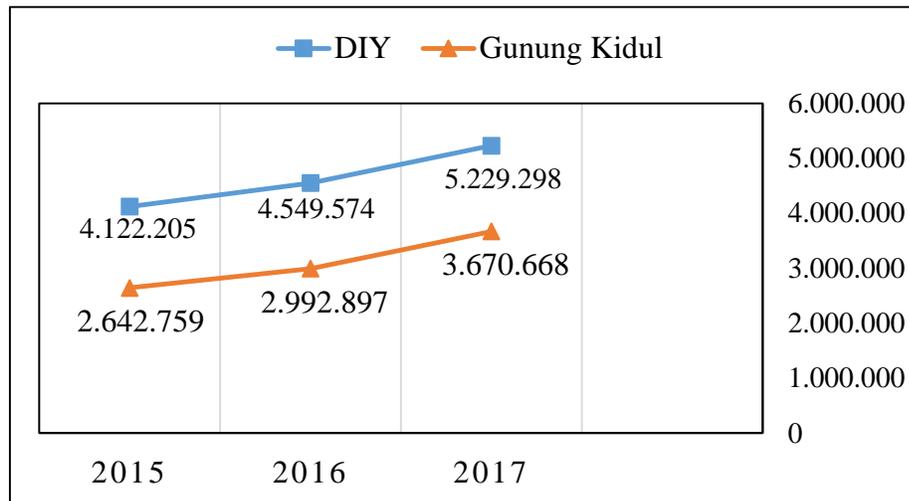


Persoalan utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah kemiskinan yang akan berdampak pada masalah sosial di masyarakat. Pada saat ini telah berkembang banyak pemikiran-pemikiran inovatif guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sekaligus mampu mengurangi masalah sosial di masyarakat, berbagai bentuk usaha kreatif telah tercipta pada zaman millenium ini, mulai dari kuliner, wisata alam, furniture, macam-macam jasa unik, dan sebagainya. Dengan adanya usaha kreatif yang berkembang di Indonesia, diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan masalah sosial di masyarakat.

Indonesia adalah negara dengan banyak destinasi pariwisata, di setiap daerah memiliki ciri khas wisata tersendiri. Terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan bahasa membuat Indonesia kaya akan kebudayaan, hal itu yang dapat menarik wisatawan berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Indonesia selalu mengalami peningkatan baik dari wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Saat ini banyak daerah atau kabupaten yang sedang dan telah mengembangkan potensi alam masing-masing, sehingga pada saat ini jumlah wisatawan semakin meningkat, mereka rela mengorbankan waktunya untuk mencari wisata terbaru dan diunggah di media sosial. Potensi inilah yang sedang dikembangkan oleh pemerintah desa ataupun daerah untuk mengembangkan potensi desa atau daerah demi meningkatkan PAD masing-masing.

DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah salah satu provinsi yang memiliki beragam destinasi wisata, dari kelima kabupaten di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Gunungkidul menjadi kabupaten yang intensif membangun sektor pariwisata. Menurut data dari BPS bahwa kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2015-2017 selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan jika pemerintahan Gunungkidul memang serius membangun sektor pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY.2017.

Gambar 1. 2 Jumlah Wisatawan Indonesia dari Tahun 2015-2017

Dengan adanya pertumbuhan jumlah wisatawan di DIY dan Gunungkidul setiap tahunnya, maka dampak untuk perekonomian warga juga meningkat, hal ini ditunjukkan dengan pendapatan dari sektor pariwisata untuk Gunungkidul pada tahun 2017 sebesar Rp.32.758.748.570. Gunungkidul menjadi kabupaten dengan potensi wisata yang sangat banyak, terdapat pantai, goa, dan kenampakan alam lainnya, menurut dinas pariwisata terdapat 127 objek wisata meliputi wisata alam, budaya, ataupun buatan.

Untuk saat ini telah berkembang desa wisata di Gunungkidul, desa wisata adalah sebuah desa dengan ciri khas tertentu yang dapat disajikan menjadi wisata, seperti kenampakan alam yang unik, keragaman hayati, dan budaya tradisional. Ini lah sebab mengapa banyak wisatawan tertarik untuk berkunjung ke desa wisata, mereka tertarik dengan kearifan lokal dan tradisi penduduk setempat yang mampu mereka pelajari selama berkunjung ke desa wisata.

Menurut dinas pariwisata Kabupaten Gunungkidul, desa wisata yang terdaftar yaitu terdapat sembilan desa termasuk desa budaya. Dari sembilan desa wisata, hanya Kecamatan Patuk yang memiliki empat desa wisata, yaitu Desa Wisata Nglanggeran, Desa wisata Bobung, Desa Wisata Jelok, dan Desa Wisata Kampung Emas. Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata IV(KSP IV) pada tahun 2014 tentang desa wisata dan desa budaya, dari keempat desa wisata yang berada di patuk hanya Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata Bobung yang termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata IV(KSP IV) dan menurut peraturan bupati pasal 15 ayat (3) i, bahwa Desa Wisata Nglanggeran dan Bobung masuk dalam strategi pengembangan wilayah patuk.

Pada tahun 2017, menurut Tribun Jogja jumlah wisatawan di Desa Wisata Nglanggeran mengalami penurunan karena harga tiket masuk yang naik, dari Rp.7000,- menjadi Rp.15.000,- namun omzet yang diterima mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2017 pendapatan dari Desa Wisata Nglanggeran sebesar Rp.2.000.000.000,-. Desa Wisata Bobung mulai diresmikan oleh Pemerintahan Gunungkidul pada tahun 2001, dan pada tahun 2018 jumlah pengrajin topeng kayu yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat 103 IKM (Industri Kecil Menengah). Sedangkan jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) di Kecamatan Patuk pada tahun 2017 terdapat 1301 IKM.

Untuk itu desa wisata hadir sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat guna mampu meningkatkan perekonomian, sehingga cara ini merupakan salah satu

andalan pemda Gunungkidul untuk menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara. Masing-masing desa wisata memiliki ciri tersendiri sehingga akan memberikan kesan berbeda pada pengunjung apabila berkunjung ke desa wisata yang ada di Gunungkidul. Menurut (Ahmad, 2014) melakukan penelitian dan menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata pada suatu daerah akan memberikan dampak kemandirian terhadap komunitas lokal, sehingga dengan adanya desa wisata mampu memberdayakan warga setempat guna mencapai kesejahteraan sosial.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Paresishvili, 2017), di dapatkan kesimpulan bahwa pembangunan desa wisata di sebuah Negara akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan masalah demografi yang menurun. Begitu juga menurut (Ma'ruf, 2016), menyimpulkan dalam hasil penelitiannya, bahwa modal sosial seperti saling menghormati, saling membantu, kemandirian, dan toleransi akan menjaga infrastruktur pedesaan yang ada, bahkan mampu untuk menarik masyarakat dalam melakukan swadaya pembangunan.

Namun pada tahun 2017 Kecamatan Patuk menurut data Bappeda DIY masih terdaftar dalam titik kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul bersama dengan 9 kecamatan lainnya, padahal dengan adanya desa wisata kecamatan patuk seharusnya mampu mengurangi tingkat kemiskinan di setiap tahunnya. Dari masing-masing desa wisata yang berada di Kecamatan Patuk seharusnya setiap tahunnya dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemerintahan

Kecamatan Patuk dan dikelola untuk mengurangi jumlah kemiskinan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui desa wisata.

Pada ayat Al-Quran dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang menjelaskan jika bumi diciptaka untuk mencari rezeki atau bekerja sehingga kita akan terhindar dari kemiskinan, untuk itu dalam mengatasi kemiskinan maka suatu kaum atau masyarakat harus berusaha dalam mencari rezeki.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang peran desa wisata dalam mengurangi kemiskinan di Gunungkidul dengan studi kasus di kecamatan Patuk, penelitian ini diberi judul, “PERAN DESA WISATA DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI GUNUNGKIDUL: STUDI KASUS DESA WISATA NGLANGGERAN DAN BOBUNG”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah dengan berfokus pada warga desa (wiraswasta) yang ada di 2 desa wisata yang berada di Kecamatan Patuk yaitu Desa Wisata Nglanggeran yang ter pusat di Dusun Nglanggeran Wetan dan Desa Wisata Bobung.

C. Rumusan Masalah

Gunungkidul menjadi kabupaten yang maju dalam 4 tahun terakhir, hal ini disebabkan salah satunya karena perkembangan wisata yang cukup pesat, banyak masyarakat menggantungkan hidupnya melalui kegiatan pariwisata. Desa wisata menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup pesat perkembangannya di

Gunungkidul, sehingga saat ini semakin banyak desa wisata baru yang bermunculan.

Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu persoalan yang harus terjawab melalui program pengembangan wisata di Gunungkidul, salah satunya adalah desa wisata. Dengan sistem socialenterpreneur masyarakat mampu bekerjasama untuk menghasilkan profit tanpa adanya unsur persaingan, sehingga kerukunan anatar warga tetap terjaga. Apabila pengembangan desa wisata mampu berjalan dengan baik, maka akan muncul peluang usaha baru yang mampu diciptakan oleh masyarakat sekitar, sehingga selain mengurangi tingkat pengangguran, hal ini mampu memperkecil jumlah pemuda desa yang melakukan urbanisasi ke kota-kota besar, karena pada konsep ini mempunyai tujuan untuk menjadikan desa sebagai kekuatan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Untuk itu penelitian ini ingin membuktikan apakah program desa wisata berpengaruh pada:

- a. Bagaimana respon warga desa terhadap pendapatan sebelum dan sesudah adanya Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata Bobung?
- b. Bagaimana respon warga desa terhadap kesempatan kerja sebelum dan sesudah adanya Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata Bobung?
- c. Bagaimana respon warga desa terhadap keadaan sosial sebelum dan sesudah adanya Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata Bobung?

D. Tujuan Penelitian

Desa wisata mempunyai tujuan yang baik untuk masyarakat agar dapat menciptakan kemandirian ekonomi, sehingga tingkat pengangguran mampu berkurang dan akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan yang akan mengalami penurunan. Kebudayaan atau kearifan local harus tetap terjaga dalam konsep desa wisata ini, namun terkadang bentuk kebudayaan itu mampu berubah karena terlalu banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung sehingga sedikit mampu mempengaruhi kebiasaan masyarakat sekitar.

Dengan penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana respon warga desa terhadap pendapatan sebelum dan sesudah adanya Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata Bobung.
2. Bagaimana respon warga desa terhadap kesempatan kerja sebelum dan sesudah adanya Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata Bobung.
3. Bagaimanakah respon warga desa terhadap keadaan sosial sebelum dan sesudah adanya Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata Bobung.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

1. Pengelola Desa Wisata Nglanggeran dan Bobung agar dapat mengetahui, bagaimana respon warga terhadap pendapatan, kesempatan kerja, dan keadaan sosial sebelum dan setelah adanya desa wisata.
2. Pemerintah kabupaten ataupun desa agar tahu apakah desa wisata mempunyai dampak bagi masyarakat sehingga mampu dijadikan evaluasi dan referensi dalam membangun perekonomian.
3. Sebagai referensi akademik untuk menambah literasi dalam perkembangan desa wisata.